



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2018 – 2019
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Juni 2019
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 15.05 WIB s.d 16.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2019 sampai dengan Bulan Mei 2019. 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2020 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Sekretaris Jenderal dan para Pejabat Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 15.05 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan para Pejabat Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada hari ini adalah:
 - 1) Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2019 sampai dengan Bulan Mei 2019.
 - 2) Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2020 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
3. Ketua Rapat mempersilakan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Setjen dan masing-masing Unit Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai capaian terhadap target pelaksanaan APBN TA 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar Setjen dan masing-masing Unit Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan upaya untuk peningkatan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
2. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Setjen dan masing-masing Unit Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

No	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	PAGU KEBUTUHAN	PAGU INDIKATIF
1.	Sekretariat Jenderal	350.000.000	207.298.626
2.	Inspektorat Jenderal	65.000.000	51.396.100
3.	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	492.892.605	178.520.013
4.	Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.730.344.873	1.953.663.767
5.	Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan	697.988.806	101.518.278
6.	Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu	692.058.082	99.462.573
7.	Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal	906.260.182	113.110.182
8.	Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	592.383.124	287.728.971
9.	Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi	885.072.327	198.036.385

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama Setjen dan masing-masing Unit Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memperjuangkan pagu anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan anggaran di DPR RI.

3. Sebagai tindaklanjut Rapat Kerja tanggal 13 Juni 2019, maka Setjen dan masing-masing Unit Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersedia untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan saran dan usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020.
4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Setjen dan masing-masing unit Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyempurnakan materi paparan mengenai rincian realisasi Tahun Anggaran 2019 serta program masing-masing unit eselon I dalam RAPBN TA 2020 dengan memperhatikan usul dan saran Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 24 Juni 2019

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI,

ANWAR SANUSI

KETUA RAPAT,

FARY DJEMY FRANCIS